

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI PANTAI LEKOENA DESA WARUPELE 1 KECAMATAN INERIE KABUPATEN NGADA

Christina Welly Plaituka^{1*}, Apolonia Bay²

^{1,2} Politeknik Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur

* E-mail: krystynwelly@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Pantai Lekoena, Desa Warupele I, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan obserasi dan wawancara langsung kepada *informan* yang telah di tentukan seperti pemerintah, pihak pengelola Pantai Lekoena, masyarakat, dan wisatawan, serta pengumpulan bukti penelitian berupa dokumentasi gambar. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Pantai Lekoena, Desa Warupele I, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat yakni masyarakat bersama-sama membersihkan pantai, memberikan dukungan dan tenaga masyarakat memberikan swadaya kepada pengelola untuk mengembangkan pariwisata. Manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat adalah meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan pariwisata ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yaitu masyarakat dapat menjual dagangan dan juga bisa menjajahkan kuliner kepada wisatawan yang berkunjung.

Kata kunci : Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, Pantai, Desa Wisata

Abstract

This study aims to determine the development of community-based tourism in Lekoena Beach, Warupele I Village, Inerie District, Ngada Regency. In this study, the research method used is descriptive qualitative by conducting direct observations and interviews with predetermined informants such as the government, Lekoena Beach managers, communities, and tourists, as well as collecting research evidence in the form of image documentation. Based on the results of interviews, it can be concluded that Community-Based Tourism Development in Lekoena Beach, Warupele I Village, Inerie District, Ngada Regency. Based on the results of the interview, it can be concluded that the form of community participation and involvement is that the community together cleans the beach, the community provides self-help to the manager to develop tourism. The economic benefits received by the community are improving the community's economy and the development of this tourism can create jobs for the community, namely the community can sell merchandise and can also sell culinary delights to visiting tourists.

Keywords : Community Based Tourism Development, Beach, Rural Tourism

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan, mempunyai potensi untuk mengembangkan industri pariwisata sangat besar, karena sektor pariwisata di Indonesia khususnya dan dunia umumnya juga telah berkembang pesat. Perkembangan industri pariwisata tersebut tidak hanya dapat berdampak pada pendapatan devisa negara saja, namun juga telah mampu untuk memperluas kesempatan berusaha serta menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan mengatasi pengangguran di daerah (Rahma, 2013).

Sektor pariwisata di Indonesia saat ini

dinilai efektif peranannya dalam menambah devisa negara. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan kebutuhan pariwisata, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Pertumbuhan kebutuhan manusia akan pariwisata menyebabkan sektor ini dinilai mempunyai prospek yang besar di masa yang akan datang. Sektor pariwisata mampu menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitarnya, pariwisata juga diposisikan sebagai sarana penting dalam rangka memperkenalkan budaya dan keindahan alam daerah terkait. Menurut Norval (Spillane 1987), seorang ahli ekonomi berkebangsaan Inggris memaparkan bahwa pariwisata selain bermanfaat bagi

pendidikan kebudayaan dan sosial juga mempunyai arti yang lebih penting dari segi ekonomi. Banyak negara di dunia menganggap pariwisata sebagai *Invisible export* atas barang dan jasa pelayanan kepariwisataan yang dapat memperkuat neraca pemasukan.

Kegiatan pariwisata terjadi bila ada daerah tujuan wisata dan wisatawan, yang membentuk suatu sistem. Bekerjanya sistem kepariwisataan yang utama terdiri dari sisi permintaan dan sisi penyediaan. Sisi permintaan merupakan masyarakat yang mempunyai keinginan untuk berwisata, orang yang melakukan perjalanan wisata disebut wisatawan. Sisi penyediaan meliputi komponen transportasi, daya tarik wisata, pelayanan dan informasi/promosi. Sisi penyediaan ini merupakan produk daerah tujuan wisata, (Warpani, 2006). Pariwisata merupakan sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan terhadap perekonomian suatu daerah. Oleh sebab itu, maka pariwisata merupakan investasi yang penting pada sektor non migas bagi Indonesia. Pariwisata yang merupakan investasi ekonomi masa depan akan secara otomatis mempermudah perputaran barang dan jasa pelayanan di tempat wisata. Lebih jauh lagi pariwisata akan meningkatkan stabilitas ekonomi nasional, namun tentu saja keberhasilan dalam pengembangan pariwisata seperti di atas akan mampu dirasakan apabila faktor-faktor pendukungnya telah dipersiapkan dengan baik.

Dalam suatu Negara jika ingin meningkatkan perekonomian, sosial dan lingkungan, perlu adanya pengelolaan serta pengembangan dalam sektor daya tarik wisata yang baik. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia cukup memiliki potensi daya tarik wisata yang besar, maka dari itu jika dilakukan pengelolaan dan pengembangan yang sesuai, ini dapat dikembangkan menjadi sebagai aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan devisa Negara dengan cepat (*quick yielding*). Jika daya tarik wisata dapat dipandang sebagai bahan industri maka dari itu bahan bakunya tidak akan pernah habis, tidak seperti bahan baku yang terdapat di wisata yang lain. Pengelolaan serta pengembangan kawasan dalam daya tarik wisata yang di daerah juga dapat dijadikan sebagai suatu katalisator dalam pembangunan sektor lain yang masih relevan dengan kepariwisataan seperti: kamar yang dapat untuk menginap (hotel), kuliner, perjalanan dalam wisata (*travel agent*), serta industri dalam kerajinan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian rakyat.

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan model ideal pengembangan pariwisata masa depan di Indonesia (Pitana dan Putra; 2010). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism development*) harus melibatkan masyarakat lokal sebagai salah satu pemangku kepentingan di dalam pengelolaannya. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat meminimalisasi dampak negatif dari pengembangan pariwisata yang mengandalkan pihak luar, karena mengutamakan keterlibatan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pembagian hasil. Pokdarwis merealisasikan program pariwisata berbasis masyarakat bertujuan untuk penambahan sumber pendapatan masyarakat tanpa menciptakan ketergantungan pada satu usaha saja, pemerataan pendapatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal dan mendukung pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut diperlukan penelitian terkait pengembangan pariwisata berbasis masyarakat terutama dalam hal partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata.

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari empat (4) pulau besar yakni : Pulau Flores, Pulau Timor, Pulau Sumba dan Kepulauan Alor yang merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia dengan 566 pulau. Pulau Flores, dari bahasa Portugis yang berarti "bunga" adalah sebuah pulau yang berada di wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Nama Flores berasal dari bahasa Portugis yaitu "*cabo de flores*" yang berarti "Tanjung bunga". Nama tersebut semula di berikan oleh S.M. Akhirnya di pakai secara resmi sejak tahun 1636 oleh gubernur jenderal hindia belanda Hendrik Brouwer. Sebuah studi yang cukup mendalam oleh Orinbao (1969) mengungkapkan bahwa nama asli sebenarnya Pulau Flores adalah Nusa Nipa (pulau ular) yang dari sudut antropologi, istilah ini lebih bermanfaat karena mengandung berbagai makna filosofis, Kultural, dan Tradisi Ritual masyarakat Flores.

Salah satu kabupaten di Pulau Flores adalah Kabupaten Ngada dengan sebutan akrab "Tana Ngada". Kabupaten Ngada adalah sebuah kabupaten di bagian tengah pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Ibu kota Kabupaten Ngada adalah Bajawa. Luas wilayah 1.621 km² dengan jumlah penduduk 162.299 jiwa. Kabupaten Ngada berada di Koordinat: 8.66667°S 121°E. Kabupaten Ngada terletak di sebelah barat

pulau Flores. Kabupaten Ngada terdiri dari 12 kecamatan, 16 kelurahan, dan 135 desa. Kabupaten Ngada juga tidak kalah cantiknya dari kabupaten lain yang ada di pulau Flores. Potensi wisata Ngada hingga kini terus agar lebih banyak menarik minat para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Kecamatan Inerie adalah salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Kecamatan Inerie memiliki 10 desa yaitu Desa Inerie, Desa Kelitei, Desa Legeriwu, Desa Manubhara, Desa Paupaga, Desa Sebowuli, Desa Tiwurana, Desa Waebela, Desa Warupele I (Ruto), dan Desa Warupele II. Desa Warupele I (Ruto) adalah desa yang dulunya merupakan salah satu kampung adat yang dikenal dengan nama kampung Adat Ruto. Dengan adanya pemekaran Kecamatan dan Desa, sekarang Desa Warupele 1 merupakan salah satu desa dari sepuluh desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Inerie yang mempunyai perkampungan adat, dan sering dikunjungi para wisatawan, baik asing maupun lokal. Bukan hanya perkampungan adat, akan tetapi desa Warupele I mempunyai potensi wisata bahari yaitu Pantai Lekoena yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun asing.

Pantai Lekoena adalah sebuah daya tarik wisata pantai yang berada di Desa Warupele I, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur. Pantai ini dikelola dan dikembangkan oleh Komunitas Berbasis Masyarakat yaitu Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan tujuannya sebagai pelaku utama dimana mereka bisa mengelola dan mengatur sendiri daya tarik wisata yang dikelolanya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelompok tersebut. Panorama keindahan dan kesejukan daya tarik wisata ini masih sangat asli. Keunggulan dari pantai lekoena adalah keadaan alam yang sejuk karena di pesisir pantainya ditumbuhi oleh pohon bakau, pohon kelapa dan juga suasana pantai ini sangat tenang dan bersih. Wisatawan dapat menikmati indahnya *sunset*, menikmati berbagai jajanan kuliner lokal yang jadi unggulan, dan menikmati keindahan pemandangan piramida gunung Inerie. Pantai lekoena memiliki potensi wisata pantai yang mengagumkan, namun terdapat kekurangan dalam pengelolaan kawasan wisata, yakni; pengelola mengalami kekurangan dana, beberapa fasilitas yang belum dilengkapi, jalan masuk masih dalam keadaan rusak, belum adanya tarif masuk ke daya tarik wisata, kurangnya kunjungan dari wisatawan karena adanya pandemi covid-19. Dalam

pengembangan juga terdapat kendala yaitu adanya konflik antara pengelola dan pihak desa, karena belum adanya pemahaman dalam mengelola pantai tersebut. Akan tetapi, dengan semangat pantang menyerah pengelola tetap menjalankan usaha pengembangan pariwisata dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata berbasis masyarakat atau dikenal dengan istilah *community based tourism* (CBT) sebagai kegiatan kepariwisataan yang sepenuhnya dimiliki, dijalankan, dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi tradisi sosial-budaya yang bernilai maupun sumber daya alam dan warisan budaya ASEAN (2015).

Menurut Suansri dalam Kusuma Dewi (2013:35), mendefinisikan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Adapun 5 dimensi dalam aspek utama pengembangan CBT, yakni :

- a) Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.
- b) Dimensi sosial dengan indikator meningkatnya kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki –laki perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas.
- c) Dimensi budaya dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya. Budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal.
- d) Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi.
- e) Dimensi politik, dengan indikator meningkatkan partisipasi dari penduduk

lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan sumber daya alam.

Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga pemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat). Pariwisata berbasis masyarakat dikembangkan berdasarkan prinsip keseimbangan dan keselarasan antar kepentingan *stakeholder* pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Secara ideal prinsip pembangunan pariwisata “dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat”. Dalam setiap tahapan pembangunan, yang dimulai dari perencanaan, pembangunan dan pengembangan sampai dengan pengawasan dan evaluasi, masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berperan disemua pembangunan pariwisata berbasis masyarakat baik perencana, investor, pengelola, pelaksana, pemantau maupun evaluator. Peran serta masyarakat di dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang berpotensi agar daya tarik wisata tidak terabaikan. Untuk itu pemerintah sebagai fasilitator dan *stakeholder* harus dapat memotivasi kepada masyarakat agar bersedia berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata.

2.1.2 Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Diskusi tentang pengembangan masyarakat telah menjadi isu yang berkembang dalam kajian-kajian pembangunan. Beragam pendapat telah dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan tentang pengembangan masyarakat ini, mulai dari definisi, sejarah, prinsip, hingga strategi dalam pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat dipandang sebagai sebuah program ketika pengembangan masyarakat tersebut memiliki seperangkat prosedur dan sederet aktifitas. Selanjutnya pengembangan masyarakat dipandang sebagai sebuah gerakan ketika pengembangan masyarakat diarahkan sebagai penjabaran dari nilai-nilai dan tujuan. Sunaryo

(2013:218) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta.

Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah:

- a) Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri sampingan lainnya.
- b) Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
- c) Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional.

Community based tourism sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, social, dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Teori ini melihat *community based tourism* bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan kapasitas komunitas dari lingkungan, sementara aspek ekonomi menjadi *induced impact* dari aspek sosial, budaya, dan lingkungan, Janianton (2013).

Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development paradigma*). Pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk menggerakkan segenap potensi dan dinamika masyarakat, guna mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak berarti merupakan upaya kecil dan lokal semata, tetapi perlu diletakkan dalam konteks kerjasama masyarakat secara global.

Secara umum peran masyarakat lebih menitikberatkan kepada partisipasi. Tinggi rendahnya partisipasi yang diberikan akan berdasarkan pada tingkat keberdayaan yang dimiliki oleh masyarakat dan kemampuan pemahaman pada setiap level dalam proses kebijakan public. Pada dasarnya tidak semua

masyarakat sudah mampu memberikan saran, kritik, ide dan sebagainya. Peran lain dapat digali adalah partisipasi di bidang pendanaan. Pengerahan dana masyarakat sering kali dilakukan sebagai perbandingan kemampuan masyarakat terhadap pendanaan dalam satu kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta, sumber pendanaan yang dihimpun masyarakat lebih populer disebut dengan swadaya masyarakat.

Salah satu konsep yang menjelaskan peranan komunitas dalam pembangunan pariwisata adalah *community based tourism*, yaitu konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut andil dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya. Pentingnya pengertian partisipasi untuk diketahui karena pariwisata berbasis masyarakat sangat memerlukan keterlibatan masyarakat (terutama masyarakat sekitar). Tanpa adanya keterlibatan masyarakat, pariwisata berbasis masyarakat tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran.

Keberhasilan pariwisata berbasis masyarakat akan mampu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan membawa dampak positif bagi upaya pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan dapat menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari masyarakat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan pariwisata. Hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal pariwisata berbasis masyarakat adalah wisatawan. Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakikatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan.
- b) Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat.
- c) Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- d) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata (Sunaryo (2013: 219).

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sunaryo (2013: 138) bahwa dalam pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi isu strategi

pengembangan kepariwisataan saat ini. Dalam khasanah ilmu kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah *community based tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Konstruksi pariwisata berbasis masyarakat ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (*growth oriented model*) yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi

Murphy dalam Sunaryo (2013: 139) juga menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas. Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* sebagai berikut:

- a. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada.
- b. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
- c. Bentuk kepariwisataan yang menuntun pemberdayaan secara sistematis dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi.

Sedangkan menurut Hudson dan Timothy (1999) dalam Sunaryo (2013:139) pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat kepada kepariwisataan setempat, dan tata kelola kepariwisataan yang memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2.1.3 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

- a) Pengertian Kelompok Sadar Wisata
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), adalah kelembagaan di tingkat masyarakat

yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar (Rahim, 2012: 16). Dengan adanya Pokdarwis di setiap daerah diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepariwisataan dan mengembangkan potensi pariwisata di daerah itu. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan serta dalam pengembangan daerah wisatanya. Sehingga bukan hanya Pokdarwis yang akan mendapat manfaat namun juga masyarakat di sekitar daerah itu sendiri.

b) Tujuan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

Tujuan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.

2. Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.

3. Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

c) Fungsi Kelompok Sadar Wisata

1. Secara umum, fungsi Pokdarwis dalam kegiatan kepariwisataan adalah: Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata.

2. Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah.

d) Kegiatan Kelompok Sadar Wisata

Lingkup kegiatan pokdarwis yang dimaksud disini adalah berbagai kegiatan yang dapat diprogramkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi Pokdarwis. Lingkup kegiatan tersebut meliputi antara lain:

1. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang

kepariwisataan.

2. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya.

3. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.

4. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.

5. Mengumpulkan, mengolah dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.

6. Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah setempat.

e) Peran Kelompok Sadar Wisata

Kelompok Sadar Wisata memiliki peran dan posisi yang penting dalam pengembangan pariwisata diantaranya;

1. Sebagai subyek atau pelaku pembangunan
Sebagai subyek atau pelaku pembangunan, yaitu masyarakat menjadi pelaku penting yang harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengembangan kepariwisataan, bersama-sama dengan pemangku kepentingan memiliki peran dengan terkait linknya baik dari pemerintah maupun swasta.

2. Sebagai penerima manfaat

Sebagai penerima manfaat berarti bahwa masyarakat diharapkan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi yang berarti dari pengembangan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya Kelompok Sadar Wisata diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui peningkatan perekonomian mereka.

3. Sebagai penggerak dalam menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif

Salah satu aspek mendasar dalam keberhasilan membangun kepariwisataan adalah dapat diciptakannya lingkungan dan suasana kondusif yang mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat. Masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab sebagai tuan rumah (*host*) yang baik bagi tamu atau wisatawan yang berkunjung untuk mewujudkan lingkungan dan

suasana yang kondusif. Dengan terciptanya lingkungan dan suasana yang kondusif diharapkan wisatawan akan merasa nyaman dan tidak bosan untuk berkunjung ke tempat pariwisata tersebut.

4. Mewujudkan Sapta Pesona dalam masyarakat

Sapta pesona adalah unsur penting yang harus diwujudkan bagi terwujudnya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Unsur sapta pesona meliputi: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Bog dan Taylor dalam Lexy L. Moleong (2011:4) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73) mengemukakan penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Peneliti menggunakan metode penelitian ini karena lebih sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penulis menggambarkan dan menerangkan data secara keseluruhan dengan kata-kata pernyataan kemudian menarik kesimpulan. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif berbeda dengan metode kuantitatif. Dalam analisis data, penulis akan melakukan analisis data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dokumentasi serta sumber data yang telah ada untuk dapat disimpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Silalahi (2012:304) berpendapat bahwa reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara

menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data terhadap hasil pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu selama proses pengumpulan data.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah melakukan penyajian dengan memisahkan pola yang berbeda sesuai dengan jenis dan macamnya sehingga strukturnya mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang merupakan jawaban rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Desa Warupele I

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Februari 1962 Nomor : Pem. 66/1/2 Tentang Pembentukan 64 buah kecamatan dalam Propinsi Nusa Tenggara Timur salah satunya adalah Kecamatan Inerie. Kecamatan Inerie adalah salah satu dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Kecamatan Inerie memiliki 10 desa yaitu Desa Inerie, Desa Kelitei, Desa Legeriwu, Desa Manubhara, Desa Paupaga, Desa Sebowuli, Desa Tiwurana, Desa Waebela, Desa Warupele I (Ruto), dan Desa Warupele II.

Desa Warupele I memiliki panjang pantai ±3 KM dan memiliki berbagai potensi laut seperti ikan, terumbu karang yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Selain itu, memiliki satu buah pelabuhan bagi para nelayan setempat. Untuk menunjang pembangunan infrastruktur, Desa Warupele I memiliki potensi sumber daya alam batu dan pasir yang berkualitas di Lekoena yang sampai kini selain dimanfaatkan untuk melayani masyarakat desa setempat. Desa Warupele 1 juga merupakan salah satu desa dari sepuluh desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Inerie yang mempunyai perkampungan adat, dan sering dikunjungi para wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Bukan hanya perkampungan

adat, akan tetapi desa Warupele I mempunyai potensi wisata bahari yaitu Pantai Lekoena yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun asing.

1. Keadaan Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Warupele I merupakan salah satu desa dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Inerie. Desa Warupele I terletak di sebelah selatan gunung Inerie dan berada di pesisir pantai selatan laut sawu, dengan ketinggian 0-1800 M dari permukaan laut, sedangkan luas desanya 14,38 km² (1438 ha).

b. Batas Wilayah

Batas Desa Warupele I dengan Desa Warupele II telah ditentukan sedangkan dengan Desa Kelitey dan Desa Inerie tetap mengikuti Batas Desa yang sudah ada sejak dahulu. Desa Warupele I terletak diantara gunung dan laut serta diapiti oleh desa tetangga. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Inerie. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kelitey. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Inerie dan Desa Warupele I

c. Kondisi Iklim

Kondisi iklim di Desa Warupele I merupakan iklim tropis dengan suhu 24c-30c memiliki curah hujan sangat kurang yakni rata-rata 38,42 mm dengan jumlah bulan hujan 3-5 bulan. serta topografi datar dan berbukit dengan tingkat kemiringan 15-39 derajat. Curah hujan setahun keadaannya tidak menentu antara tempat rendah dekat pantai dan daerah ketinggian ± 700 meter diatas permukaan laut

2. Keadaan penduduk

a) Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk Desa Warupele I menurut data tercatat sebanyak 1357 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 646 jiwa dan perempuan sebanyak 711 jiwa.

b) Keadaan Penduduk Berdasarkan Aliran Kepercayaan

Agama adalah suatu kepercayaan yang disatukan oleh pratek-pratek yang dianggap suci. Agama merupakan seperangkat bentuk dan tindakan simbolik yang menghubungkan manusia dengan kondisi akhir eksistensinya. Untuk masyarakat di Desa Warupele I sendiri semua masyarakatnya sebagian besar menganut agama Katolik.

c) Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di Desa Warupele I dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu petani sebanyak 176 orang, nelayan 32 orang,

PNS/TNI/POLRI 16 orang, pengusaha kecil 22 orang, pensiunan 16 orang, dan tukang bangunan 27 orang.

3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

1. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Warupele 1 dalam berinteraksi dengan sesama sangat tinggi. Sikap toleransi masyarakat dalam bekerja sama atau bergotong royong sangat tinggi, sehingga satu sama lain saling menghargai. Masyarakat sangat ramah kepada orang yang datang baik orang lokal maupun orang asing.

2. Kondisi Ekonomi

Ekonomi pendapatan masyarakat Desa Warupele I di topan oleh sektor pendapatan diantaranya pertanian, peternakan, dan perikanan.

4.2 Gambaran Umum Pantai Lekoena

Pantai lekoena adalah salah satu pantai yang ada di Kabupaten Ngada, yang berada di Desa Warupele I Kecamatan Inerie. Pantai Lekoena memiliki keindahan dan keasrian alam yang masih terjaga sampai saat ini. Pantai ini juga memiliki keunikan yang berbeda dengan pantai lainnya yang ada di Kabupaten Ngada.

Keunggulan dari wisata Pantai Lekoena ini adalah keadaan alamnya yang sejuk karena dipesisir pantainya ditumbuhi oleh pohon peneduh di pinggir pantai atau biasanya disebut hutan waru dan pepohonan kelapa yang rimbun. Selain itu kalian juga bisa menikmati keindahan pemandangan piramida alam. Gunung Inerie yang sudah dikenal dunia. Tempat ini juga menjadi pusat kuliner. Tak jauh dari pantai ini, terdapat pelabuhan pendaratan ikan. Umumnya, ikan yang tersedia masih segar, merupakan hasil tangkapan nelayan Warupele I. Ikan siap diolah dengan berbagai variasi.

Selain kuliner dan pemandangan alam, para pengunjung juga bisa menikmati *sunset* yang sempurna dari tempat ini sambil menikmati kopi Arabika Flores Bajawa di warung - warung yang ada disekitar pantai. Di tempat bisa menjadi tempat untuk latihan berenang karena komunitas Lekoena (Pokdarwis) menyediakan berbagai wahana air yang bisa disewa juga tenaga pendamping renang. Kampung tradisional Maghilewa dan Watu bisa menjadi tujuan alternatif lain bila ingin melanjutkan perjalanan wisata di selatan kabupaten Ngada. Pantai Lekoena memiliki garis pantai yang panjang. Di sana tersaji berbagai jenis ikan. Wisata Pantai Lekoena Desa Warupele I bisa dibilang sebuah wisata air yang memiliki beberapa akan fasilitas dan pelayanan di antaranya sebagai berikut: area Parkir kendaraan, kamar mandi / WC, tempat bersantai, tempat sampah, dan wahan

permainan air.

4.2.1 Analisis Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Luas wilayah 1.621 km² dengan jumlah penduduk 162.299 jiwa. Kabupaten Ngada berada di Koordinat: 8.66667°S 121°E. Kabupaten Ngada terletak di sebelah barat pulau Flores. Kabupaten Ngada terdiri dari 12 kecamatan, 16 kelurahan, dan 135 desa. Kabupaten Ngada memiliki daya tarik wisata yang menarik untuk dikunjungi salah satunya adalah Pantai Lekoena. Seiring waktu Kabupaten Ngada mengalami kemajuan di bidang pariwisata, karena adanya daya tarik wisata alam dan wisata budaya yang begitu terkenal.

Pemerintah Kabupaten Ngada beserta pihak pengelola selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata yang ada di Pantai Lekoena dengan baik dan benar, agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Hal ini terbukti bahwa masyarakat setempat ikut terlibat seperti pembersihan pantai, penataan, dan lain-lain. Pemerintah juga ingin agar masyarakat selalu terbuka dan memiliki kesadaran untuk ikut terlibat dalam mengembangkan pantai, agar bisa meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dalam berbagai aspek pembangunan, masyarakat selalu menjadi unsur yang utama karena pembangunan ditujukan sebesar-besarnya untuk kepada masyarakat.

Pada penelitian terkait Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Pantai Lekoena Desa Warupele I Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada penulis akan membahas terkait pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dengan melihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Penulis akan membahas sesuai dengan hasil penelitian dan observasi di lapangan dalam pemaparan sebagai berikut:

Menurut Suansri dalam Kusuma Dewi (2013:35), terdapat lima dimensi yang merupakan aspek utama pengembangan dan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi yaitu adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata.

Keterlibatan pemerintah dalam

mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat memang sangat penting, karena akan mendorong masyarakat untuk ikut mengembangkan pariwisata. Pemerintah bukan hanya memberikan dana, akan tetapi juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pengelola di tempat wisata.

Sektor pariwisata dapat memajukan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat dan daerah wisata tersebut. Dengan kebijakan pemerintah yang tepat sektor pariwisata mampu meningkatkan kesejahteraan daerah wisata tersebut. Adapun beberapa dampak pariwisata terhadap perekonomian yakni membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, meningkatkan pendapatan daerah, dan dapat mengenalkan kebudayaan asli kepada wisatawan yang berkunjung.

Menciptakan nilai manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, sehingga pariwisata dapat secara nyata menunjukkan fungsinya sebagai agen pembangunan daerah maupun instrumen pemberdayaan masyarakat yang efektif, nilai manfaat ekonomi tersebut dapat disumbangkan melalui penciptaan dampak ekonomi multi ganda pariwisata dampak ekonomi yang langsung, tak langsung maupun dampak ekonomi ikutan, bagi masyarakat. Objek wisata Pantai Lekoena memberikan manfaat bagi masyarakat utamanya dalam pembangunan perekonomian masyarakat.

Kendala yang dihadapi dari segi ekonomi adalah terjadinya badai seroja yang merusak warung-warung disekitar Pantai Lekoena dan munculnya covid-19 yang menghambat segala kegiatan pengembangan pariwisata di Pantai Lekoena.

2. Dimensi Sosial

Dimensi Sosial yaitu meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki, perempuan, generasi muda dan tua, membangun penguatan organisasi komunitas.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan konsep yang menekankan kepada pemberdayaan komunitas untuk menjadi lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki, seperti adat istiadat, kuliner, dan objek wisata. Pariwisata berbasis masyarakat menfokuskan pada masyarakat itu sendiri. Maka peran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan pariwisata yang ada. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Maka demi keberhasilan pengembangan pariwisata dibutuhkan keterlibatan masyarakat. Namun, pada

kenyataannya partisipasi dan kesadaran masyarakat di Pantai Lekoena dalam pengembangan pariwisata yang ada masih dikategorikan belum maksimal, karena kurang kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melestarikan daya tarik wisata di Pantai Lekoena. Kendala yang dihadapi adalah keterlibatan masyarakat belum maksimal, karena masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, dan pengelola juga mengalami kekurangan dana untuk pembangunan pariwisata di Pantai Lekoena.

3. Dimensi Budaya

Dimensi budaya yaitu mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal

Kebijakan pembangunan pariwisata nasional merupakan upaya untuk mendorong pelaku di sektor kepariwisataan dalam mencapai sasaran yang digariskan dan tujuan yang ditetapkan. Salah satu faktor yang mendorong kepariwisataan adalah aspek sosial budaya. Aspek budaya sendiri itu berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat selalu berkaitan dengan keramamatan, aturan-aturan budaya yang sudah dibuat agar selalu dipatuhi oleh orang lain. Dari aspek budaya yang berkaitan dengan adat istiadat saja, akan tetapi kebiasaan masyarakat yang hal penting, baik tata krama maupun aturan-aturan lainnya.

Kendala yang dihadapi adalah belum adanya fasilitas khusus yang berkaitan budaya Ngada, misalnya poster-poster yang menggambarkan budaya Ngada, penyediaan pakaian adat untuk disewakan, menghadirkan tokoh adat yang mengetahui banyak hal tentang budaya Ngada, dan membuat festival yang berkaitan dengan budaya Ngada. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Ngada ke wisatawan yang datang baik wisatawan lokal, maupun wisatawan asing.

4. Dimensi Lingkungan

Dimensi Lingkungan yaitu mempelajari *carryng capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konserasi.

Fasilitas, sarana dan prasarana adalah aspek yang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Fasilitas, sarana dan prasarana sangat mempengaruhi tingkat minat pengunjung suatu tempat pariwisata. Karena jika suatu tempat wisata mempunyai fasilitas, sarana, dan prasarana yang kurang memenuhi standar, maka menurunkan minat pengunjung

untuk berkunjung ke tempat wisata tersebut.

Kendala yang dihadapi adalah setelah terjadinya badai seroja menyebabkan beberapa fasilitas mengalami kerusakan dan masih ada wisatawan dan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, padahal pengelola sudah menyiapkan tempat sampah.

5. Dimensi Politik

Dimensi politik yaitu meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam.

Peran pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengembangkan Pantai Lekoena sangat penting karena merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap program yang dibangun, namun sumber daya manusia menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata. Sehingga perlu adanya lembaga pemerintah aktif dalam meningkatkan SDM. Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat tentu harus ada kerja sama antara masyarakat, pemerintahan desa dan pemerintahan daerah, dan pelaku usaha di bidang pariwisata. Masyarakat perlu diberikan pembinaan dan pelatihan serta sosialisasi tentang pentingnya pariwisata berbasis masyarakat agar masyarakat dapat bersemangat untuk terus berkarya dan membuat sesuatu yang bernilai, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai bentuk pengembangan wisata di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Kendala yang dihadapi adalah belum adanya kerja sama dan masih ada kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan pengelola yang belum memahami dalam mengelola pariwisata sehingga untuk kegiatan pariwisata masih belum stabil.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Pantai Lekoena adalah

1. Pengembangan secara ekonomi yakni tersedianya kuliner yang dibuat oleh kelompok kuliner yang berasal dari masyarakat sendiri, dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan menarik perhatian wisatawan yang berkunjung.
2. Sudah terdapat pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata yang ada di Pantai Lekoena.
3. Sudah terciptanya lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat setempat.
4. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh.
5. Sudah ada pendampingan dari pemerintah yaitu Dinas Pariwisata

Kabupaten Ngada.

6. Masyarakat dan pengelola selalu membersihkan pantai dan menyediakan tempat sampah untuk para wisatawan.
7. Sudah ada promosi Pantai Lekoena melalui media sosial yakni internet, instagram, dan facebook.

4.2.2 Potensi wisata di Pantai Lekoena

Pantai Lekoena memiliki potensi wisata yang patut di jaga dan di lestariakan. Potensi tersebut di bagi menjadi 4 A, yaitu sebagai berikut:

a. Atraksi

Pantai Lekoena memiliki keindahan dan keasrian alam yang masih terjaga sampai saat ini. Pantai ini juga memiliki keunikan yang berbeda dengan pantai lainnya yang ada di Kabupaten Ngada. Selain masih asri, pantai ini juga dikatakan sebagai tempat yang dijadikan sebagai pusat kuliner. Selain menikmati jajanan kuliner, wisatawan juga bisa menikmati *sunset* yang begitu indah sambil menikmati kopi Arabika Bajawa. Selain itu, wisatawan juga bisa mengunjungi Kampung Tradisional Maghilewa dan Kampung Tradisional Watu yang berada tidak jauh dari daya tarik wisata Pantai Lekoena.

b. Amenitas

Terdapat beberapa fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di wisata Pantai Lekoena yang bisa digunakan wisatawan saat berkunjung antara lain: tersedianya kamar mandi/WC umum, tersedianya warung-warung makan yang disediakan oleh kelompok kuliner Pantai Lekoena, tersedianya tempat untuk bersantai dan tempat untuk berfoto, tersedianya wahana permainan air dan tenaga pendamping yang di sewa oleh pengelola untuk para wisatawan dan dijadikan tempat untuk *camping* bagi para wisatawan.

c. Aksesibilitas

Untuk akses masuk ke tempat ini, wisatawan dari kota Bajawa bisa melewati dua tempat yakni melewati Waebela dan bisa melewati Aimere. Jika wisatawan melewati Waebela, akan menempuh perjalanan selama 45 menit, wisatawan juga melewati kampung tradisional Bena. Rute perjalanannya yaitu kota Bajawa-Watujaji-Langa-Watu Meze-Kampung Tradisional Bena-Waebela-Pantai Lekoena dengan menggunakan kendaraan mobil maupun motor. Jika wisatawan melewati Aimere, maka akan menempuh perjalanan selama 2 jam dengan rute perjalanan dari kota Bajawa-Watujaji-Wolokoro-Bojawa-Aimere-Fo'a-Sebowuli-Warupele II-Warupele I-Pantai Lekoena dengan menggunakan kendaraan

mobil maupun motor. Untuk akses masuk ke Pantai Lekoena sudah terdapat tulisan nama *Welcome Lekoena Beach* yang berada tepat di depan pintu masuk.

d. Ancillary

Kelompok Sadar Wisata Pantai Lekoena Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan pariwisata di daerahnya. Keberadaan pokdarwis perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam menggerakkan pariwisata masyarakat untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata. Kelompok Sadar Wisata Pantai Lekoena merupakan salah satu Pokdarwis di sahkan pada tanggal 01 Maret 2019 oleh Dinas Pariwisata, Kabupaten Ngada.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Pantai Lekoena, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari segi ekonomi yang diterima oleh masyarakat yaitu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, pengembangan pariwisata ini juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Warupele I, yaitu masyarakat dapat menjual dagangan dan juga bisa menjajahkan kuliner kepada wisatawan yang berkunjung.
2. Dari segi sosial, masyarakat ikut terlibat dan ikut berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata. Masyarakat ikut terlibat dalam mengembangkan pariwisata di Pantai Lekoena. Bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat yakni masyarakat bersama-sama membersihkan pantai, masyarakat memberikan swadaya kepada pengelola untuk mengembangkan pariwisata.
3. Dari segi budaya, masyarakat Desa Warupele I memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan yang berkunjung. Selalu menunjukkan tata krama dan tutur kata yang baik, masyarakat juga selalu *welcome* kepada wisatawan. Sehingga banyak wisatawan yang merasa

- puas dengan pelayanan masyarakat di wisata Pantai Lekoena.
4. Dari segi lingkungan, fasilitas yang ada di wisata Pantai Lekoena cukup memadai, dan bisa digunakan oleh wisatawan. Tersedianya kamar mandi/WC umum, warung-warung makan yang disediakan oleh kelompok kuliner Pantai Lekoena, tempat untuk bersantai dan tempat untuk berfoto, tersedianya wahana permainan air dan tenaga pendamping yang di sewa oleh pengelola untuk para wisatawan dan dijadikan tempat untuk camping bagi para wisatawan. Akan tetapi, setelah terjadinya badai seroja, sehingga ada beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan.
 5. Dari segi politik, faktor pendukung adalah pemerintah juga ikut terlibat baik memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan juga terlibat memberikan swadaya dalam bentuk material kepada pengelola wisata Pantai Lekoena. Sedangkan faktor penghambat adalah terjadinya konflik atau kesalahpahaman antara pemerintah desa dan pengelola karena belum adanya pemahaman dalam mengelola wisata Pantai Lekoena.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran penulis terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Pantai Lekoena yaitu:

1. Pemerintah
 - a. Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam implementasi pemberdayaan masyarakat sekitar daya tarik wisata, karena masyarakat yang kurang dalam segala hal, karena pendidikan, ekonomi, dan status sosial, sehingga perlu adanya pendampingan dari pemerintah.
 - b. Perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat setempat, sehingga pengembangan pariwisata itu dapat dikelola dengan baik.
2. Pengelola Daya Tarik Wisata Pantai Lekoena
 - a. Menambahkan poster-poster yang

berkaitan dengan budaya Ngada dan menyediakan tempat yang digunakan untuk menyewa pakaian adat Ngada, agar wisatawan luar juga dapat mengenal budaya asli kita.

- b. Menambahkan fasilitas-fasilitas penunjang, memperbaiki jalan masuk menuju ke tempat wisata.
 - c. Karena adanya pandemi covid-19, pengelola harus bisa membantasi wisatawan yang datang, menyediakan tempat untuk mencuci tangan untuk wisatawan yang berkunjung.
3. Masyarakat
 - a. Diharapkan untuk para pedagang dan yang menjajah kuliner agar menambah menu makanan yang berbeda.
 - b. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuang sampah sembarangan di sekitar tempat wisata pantai.
 - c. Masyarakat juga harus tentang memperhatikan prokes untuk mengindari covid-19.
 4. Wisatawan
 - a. Diharapkan wisatawan untuk selalu memperhatikan prokes agar tidak menyebarkan virus di tempat wisata dan juga di masyarakat sekitar tempat wisata Pantai Lekoena.
 - b. Wisatawan juga tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena pengelola sudah menyiapkan tempat sampah.
 - c. Tidak menimbulkan kekacauan di sekitar Pantai Lekoena.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini terutama seluruh masyarakat dan pemerintah daerah pantai Lekoena, Kabupaten Ngada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan dan Taylor. 2012. *Prosedur Penelitian*. Dalam Moleong, *Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eky, F. S., & Saragi, R. (2020). TOURISM ATTRACTIONS DEVELOPMENT THROUGH THE TAPPING ACTIVITIES OF LONTAR TREE IN TOURIST ATTRACTION LASIANA BEACH KUPANG CITY. *TOURISM: Jurnal Travel, Hospitality, Culture, Destination, and MICE*, 3(2), 69-75.
- Ismayanti 2010. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana

J. Moelong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.

Masriana (2019). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) di Pantai Ide Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makasar.

Nur, Indriantoro, dan Bambang, Supomo. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.

Nugraha, Y., Meko, P., & Blegur, Y. (2020). PARTISIPASI MASYARAKAT PADA DAYA TARIK WISATA PANTAI MAIMOL DI KABUPATEN ALOR. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*, 21(2). doi:<http://dx.doi.org/10.7454/jurnalkessos.v21i2.257>

Nugraha, Y. (2021). Pengembangan Potensi Wisata Asam Jokowi sebagai Produk Wisata Berbasis Masyarakat Kawasan Perbatasan di Desa Tulakadi Kabupaten Belu. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, , 430 - 459. doi:10.24843/JUMPA.2021.v07.i02.p05

Nugraha, Y. E. (2021). Sosialisasi Sadar Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Fatukoto. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 2(1), 14-22.

Rahim firmansyah. 2012. *Pedoman kelompok sadar wisata*. Jakarta: Direktorat jendral pengembangan destinasi pariwisata kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif.

Rahma, Femi Nadia dan Herniwati Retno Handayani. 2013. *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Dan Pendapatan Perkapita, Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus. Di ponegoro*. *Jurnal Ekonomi*. Volume 2 (2).

Sastrayuda, Gumelar. 2010. *Konsep Pengembangan Kawasan Ekowisata*. Yogyakarta.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sunaryo. Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta.

Sugi Rahayu, M.Pd., M.Si, dkk 2015. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa*

Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.